

PENGARUH KOMUNIKASI, SUMBER DAYA DAN STRUKTUR BIROKRASI TERHADAP IMPLEMENTASI PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI KOTA TOMOHON

Ika Oktaria Gaib¹, Evi E. Masengi², Laurens Bulu³

^{1,2,3}Universitas Negeri Manado, Indonesia

Email: ikaoktaria@bps.go.id

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pengaruh komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi terhadap implementasi Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Kota Tomohon. Studi menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori dengan melibatkan 31 aparatur yang terlibat dalam pembinaan statistik sektoral sebagai responden penelitian. Data dikumpulkan melalui kuesioner berbasis skala Likert dan dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan SPSS versi 27. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi belum memberikan pengaruh signifikan terhadap implementasi program. Namun, pengujian simultan memperlihatkan bahwa ketiga variabel tersebut secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap implementasi Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Kota Tomohon. Struktur birokrasi menjadi variabel yang menunjukkan kontribusi paling dominan dibandingkan variabel lainnya. Selain itu, hubungan antara variabel independen dan implementasi program berada pada kategori sangat kuat dengan kemampuan model menjelaskan variasi implementasi program sebesar 66,6 persen. Temuan penelitian menegaskan bahwa keberhasilan implementasi program tidak hanya ditentukan oleh satu faktor tertentu, tetapi dipengaruhi oleh keterpaduan komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi dalam mendukung pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan optimalisasi prosedur kerja menjadi aspek penting dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral di tingkat daerah.

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan, Komunikasi, Sumber Daya, Struktur Birokrasi, Statistik Sektoral, Satu Data Indonesia, Indeks Pembangunan Statistik.*

Abstract

This study analyzes the influence of communication, resources, and bureaucratic structure on the implementation of the Sectoral Statistics Compilation Program in Tomohon City. The study used a quantitative explanatory approach, involving 31 officials involved in sectoral statistics development as respondents. Data were collected through a Likert-based questionnaire and analyzed using multiple linear regression using SPSS version 27. The results indicate that, partially, communication, resources, and bureaucratic structure do not significantly influence program implementation. However, simultaneous testing shows that all three variables collectively have a significant influence on the implementation of the Sectoral Statistics Compilation Program in Tomohon City. Bureaucratic structure is the variable that shows the most dominant contribution compared to other variables. Furthermore, the relationship between the independent variables and program implementation is categorized as very strong, with the model's ability to explain 66.6 percent of the variation in program implementation. The research findings confirm that the success of program implementation is not determined

solely by a single factor, but is influenced by the integration of communication, resources, and bureaucratic structure in supporting policy implementation. Therefore, strengthening inter-agency coordination, increasing human resource capacity, and optimizing work procedures are crucial aspects in improving the quality of sectoral statistics at the regional level.

Keywords: *Policy Implementation, Communication, Resources, Bureaucratic Structure, Sectoral Statistics, One Data Indonesia, Statistical Development Index.*

A. PENDAHULUAN

Transformasi digital telah mendorong perubahan mendasar dalam tata kelola pemerintahan, termasuk dalam proses pengambilan keputusan berbasis data. Pemerintah tidak lagi hanya dituntut menyediakan informasi administratif, tetapi juga memastikan bahwa data yang digunakan dalam perumusan kebijakan memiliki tingkat akurasi, konsistensi, dan validitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah Indonesia kemudian mengembangkan kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 sebagai langkah integrasi tata kelola data nasional. Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat sinkronisasi data pemerintah sehingga proses perencanaan pembangunan, evaluasi kebijakan, dan pelayanan publik dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan (Kemensetneg, 2019).

Sebagai bagian dari implementasi kebijakan tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) menyelenggarakan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) berdasarkan Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2022. EPSS dirancang sebagai instrumen evaluatif untuk menilai tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral melalui proses verifikasi dan validasi terhadap pelaksanaan statistik pada instansi pemerintah pusat maupun daerah. Evaluasi tersebut tidak hanya bertujuan mengukur perkembangan tata kelola statistik sektoral, tetapi juga memperkuat kualitas pelayanan publik berbasis data. Hasil evaluasi EPSS kemudian direpresentasikan dalam Indeks Pembangunan Statistik (IPS), yaitu indikator komposit dengan rentang nilai 1,00 sampai 5,00 yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pemerintah.

Sejak diberlakukannya Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2022, EPSS telah dilaksanakan sebanyak dua kali, yakni pada Tahun 2023 dan 2024, yang meliputi instansi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota yang melaksanakan penyelenggaraan statistik sektoral. Hasil EPSS Tahun 2023 menunjukkan bahwa dari 586 lokus yang dinilai, sebanyak 327 lokus atau 55,80 persen masih berada pada predikat "Kurang", dan 200 lokus atau 34,13 persen pada predikat "Cukup". Hanya 56 lokus yang mencapai predikat "Baik" dan 3 lokus yang mencapai predikat "Sangat Baik". Memasuki Tahun 2024, jumlah lokus meningkat menjadi 616 K/L/D/I, dan secara nasional nilai IPS mengalami kenaikan dari 1,78 menjadi 2,35. Namun demikian, kenaikan ini belum diiringi dengan peningkatan predikat, karena nilai 2,35 masih berada pada kategori "Cukup". Kondisi ini mengindikasikan bahwa secara umum penyelenggaraan statistik sektoral di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan kompleks yang memerlukan penguatan dan pembenahan secara berkelanjutan di berbagai sektor.

Kota Tomohon menjadi salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Utara yang berpartisipasi dalam pelaksanaan EPSS". Berdasarkan hasil EPSS Tahun 2024, Kota Tomohon memperoleh nilai IPS sebesar 2,65 dengan predikat "Baik". Pencapaian tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan statistik sektoral di Kota Tomohon telah memenuhi standar minimum yang ditetapkan, namun belum mencapai tingkat kematangan yang optimal. Apabila dibandingkan dengan daerah lain di Provinsi Sulawesi Utara, capaian IPS Kota Tomohon justru menjadi yang terendah. Kota Bitung mencapai nilai IPS tertinggi sebesar 3,02, disusul oleh Kota Kotamobagu dengan nilai 2,99, dan Kota Manado dengan nilai 2,92.

Perbedaan capaian IPS antar pemerintah kota di Provinsi Sulawesi Utara ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembinaan statistik sektoral tidak bersifat seragam, meskipun seluruh daerah berada dalam kerangka kebijakan nasional yang sama yakni Satu Data Indonesia. Hal ini memperkuat argumen bahwa faktor-faktor internal implementasi kebijakan di tingkat daerah, faktor komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi memiliki posisi yang krusial dalam memengaruhi capaian IPS pada suatu daerah.

Apabila ditelaah lebih mendalam, capaian IPS Kota Tomohon menunjukkan ketimpangan yang cukup signifikan antar domain penilaian. Domain Prinsip Satu Data Indonesia dan Domain Kelembagaan memperoleh nilai 3,00 dengan predikat "Baik". Domain Statistik Nasional memperoleh nilai 2,67 yang juga masih dalam predikat "Baik". Namun, dua domain lainnya yakni Domain Kualitas Data (2,46) dan Domain Proses Bisnis Statistik (2,06) masih berada pada predikat "Cukup". Variasi capaian antar domain ini mengindikasikan bahwa tantangan utama dalam penyelenggaraan statistik sektoral di Kota Tomohon tidak terletak pada aspek normatif atau kelembagaan semata, melainkan lebih berfokus pada proses implementasi operasional statistik, khususnya yang berkaitan dengan bagaimana data dihasilkan dan bagaimana proses bisnis statistik dijalankan oleh seluruh perangkat daerah.

Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan antara arah kebijakan, kesiapan kelembagaan, dan praktik pelaksanaan statistik sektoral di tingkat pemerintah daerah. Predikat "Cukup" pada dua domain evaluasi mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan target yang diharapkan. Dalam kajian kebijakan publik, situasi seperti ini dikenal sebagai implementation gap, yaitu ketidaksesuaian antara tujuan kebijakan yang telah dirumuskan dengan realitas pelaksanaannya di lapangan. Apabila kondisi tersebut tidak segera ditangani, kualitas tata kelola data dan akurasi statistik sektoral berpotensi mengalami hambatan dalam mendukung proses pengambilan keputusan pemerintah daerah.

Literatur implementasi kebijakan menjelaskan bahwa efektivitas program publik dipengaruhi oleh berbagai faktor organisasi yang saling berkaitan. George C. Edwards III menempatkan komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi sebagai faktor utama implementasi kebijakan, sedangkan Van Meter dan Van Horn menekankan pentingnya kejelasan tujuan, kapasitas organisasi, komunikasi antarlembaga, dan kondisi lingkungan kebijakan. Berdasarkan perspektif tersebut, penelitian ini memfokuskan analisis pada komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi dalam implementasi Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Kota Tomohon.

Komunikasi menjadi aspek penting karena berkaitan dengan penyampaian informasi kebijakan kepada seluruh pelaksana program. Rendahnya capaian pada Domain Kualitas Data dan Proses Bisnis Statistik mengindikasikan bahwa koordinasi dan penyampaian pedoman statistik sektoral antarinstansi belum berjalan optimal. Selain itu, keterbatasan sumber daya, baik dalam bentuk kapasitas SDM, dukungan infrastruktur, maupun kesiapan organisasi, juga diduga memengaruhi efektivitas implementasi program. Dari sisi birokrasi, meskipun struktur kelembagaan telah tersedia, efektivitas koordinasi, integrasi peran, dan kejelasan prosedur kerja antarunit masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan statistik sektoral.

Penelitian ini menganalisis pengaruh komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi terhadap implementasi Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Kota Tomohon, baik secara parsial maupun simultan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam penguatan tata kelola statistik sektoral, khususnya dalam mendukung sistem data pemerintah daerah yang lebih terintegrasi, akurat, dan akuntabel.

B. METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatori untuk menganalisis pengaruh komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi terhadap

implementasi Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Kota Tomohon (Sugiyono, 20180). Penelitian dilaksanakan pada instansi yang terlibat dalam penyelenggaraan statistik sektoral di Kota Tomohon, meliputi Badan Pusat Statistik Kota Tomohon, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pertanian dan Perikanan, serta Dinas Pangan.

Populasi penelitian terdiri atas 34 aparatur yang terlibat langsung dalam pembinaan statistik sektoral, dengan sampel sebanyak 31 responden yang ditentukan menggunakan rumus Yamane pada tingkat kesalahan 5 persen. Seluruh responden dipilih menggunakan teknik sampling jenuh. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner berbasis skala Likert lima poin yang disebarluaskan menggunakan Google Form.

Instrumen penelitian disusun berdasarkan indikator pada setiap variabel penelitian. Variabel komunikasi diukur melalui aspek penyampaian, kejelasan, dan konsistensi informasi. Variabel sumber daya mencakup kapasitas sumber daya manusia, dukungan sarana dan prasarana, serta sikap pelaksana. Struktur birokrasi dianalisis melalui aspek Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi organisasi yang berkaitan dengan pembagian tugas serta koordinasi antarunit kerja. Sementara itu, implementasi program diukur berdasarkan aspek pelaksanaan program statistik sektoral. Sebelum digunakan, instrumen penelitian terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitasnya menggunakan korelasi product moment dan Cronbach's Alpha.

Data penelitian dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan SPSS versi 27. Sebelum pengujian hipotesis dilakukan, model penelitian terlebih dahulu diuji melalui serangkaian pengujian asumsi klasik yang meliputi normalitas, linearitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas untuk memastikan kelayakan model analisis. Pengaruh variabel independen terhadap implementasi program diuji secara parsial melalui uji t dan secara simultan melalui uji F. Pendekatan analisis tersebut digunakan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi implementasi Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Kota Tomoho.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebanyak 31 aparatur yang terlibat dalam pembinaan statistik sektoral di Kota Tomohon berpartisipasi sebagai responden penelitian. Mayoritas responden memiliki latar belakang pendidikan DIV/S1 dan berada pada golongan III dengan dominasi kelompok usia 40-49 tahun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan statistik sektoral di Kota Tomohon didukung oleh aparatur dengan kapasitas pendidikan dan pengalaman kerja yang relatif memadai.

Analisis deskriptif menunjukkan bahwa seluruh variabel penelitian berada pada kategori baik. Pada variabel komunikasi, dimensi kejelasan informasi memperoleh nilai tertinggi dibandingkan dimensi lainnya, sedangkan konsistensi informasi menunjukkan nilai relatif lebih rendah yang mengindikasikan masih adanya potensi perbedaan pemahaman antarinstansi. Variabel sumber daya memperlihatkan bahwa aspek sumber daya manusia dan sikap pelaksana memperoleh penilaian tinggi, sementara sarana dan prasarana masih menjadi aspek yang memerlukan penguatan. Pada variabel struktur birokrasi, dimensi fragmentasi organisasi menunjukkan capaian sedikit lebih tinggi dibandingkan Standar Operasional Prosedur (SOP), meskipun implementasi SOP di lapangan belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Sementara itu, implementasi Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral secara umum memperoleh penilaian positif dari mayoritas responden.

Sebelum pengujian hipotesis dilakukan, model penelitian terlebih dahulu melalui pengujian asumsi klasik. Hasil pengujian menunjukkan bahwa data memenuhi persyaratan normalitas, linearitas, serta tidak mengalami gejala multikolinearitas dan heteroskedastisitas. Dengan demikian, model regresi dinilai layak digunakan dalam tahap analisis selanjutnya.

Analisis regresi linear berganda menghasilkan persamaan $Y = 1,192 + 0,291X_1 + 0,029X_2 + 0,411X_3$. Seluruh variabel independen menunjukkan arah hubungan positif terhadap implementasi program, dengan struktur birokrasi menjadi variabel yang memiliki koefisien paling besar. Nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,816 menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara variabel independen dan implementasi program, sedangkan koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,666 mengindikasikan bahwa 66,6 persen variasi implementasi program dapat dijelaskan oleh komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi.

Hasil pengujian simultan menunjukkan bahwa komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap implementasi Program Penyelenggaraan Statistik Sektor di Kota Tomohon. Namun demikian, pengujian parsial memperlihatkan bahwa masing-masing variabel independen belum menunjukkan pengaruh signifikan secara individual. Meskipun demikian, struktur birokrasi memiliki nilai kontribusi relatif lebih dominan dibandingkan variabel lainnya dalam model implementasi program.

1. Pengaruh Komunikasi Terhadap Implementasi Program Penyelenggaraan Statistik Sektor di Kota Tomohon

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa aspek komunikasi berada pada kategori baik dengan nilai rata-rata sebesar 4,43 atau setara dengan 88,6 persen dari skor maksimum. Dimensi kejelasan informasi memperoleh nilai tertinggi sebesar 4,48, diikuti penyampaian informasi sebesar 4,42, sedangkan dimensi konsistensi menunjukkan nilai paling rendah sebesar 4,39. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa proses komunikasi dalam implementasi Program Penyelenggaraan Statistik Sektor di Kota Tomohon pada umumnya telah berjalan secara efektif, baik dalam aspek penyampaian pesan, kejelasan informasi, maupun kesinambungan instruksi antarlembaga yang terlibat. Analisis regresi memperlihatkan bahwa komunikasi memiliki koefisien regresi positif sebesar 0,291. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kualitas komunikasi cenderung diikuti oleh peningkatan implementasi program ketika variabel lain diasumsikan tetap. Temuan ini memperkuat pandangan George C. Edwards III yang menempatkan komunikasi sebagai salah satu faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik. Dalam konteks Program PSS di Kota Tomohon, pola komunikasi yang melibatkan Badan Pusat Statistik sebagai pembina data, Bapelitbangda dan Diskominfo sebagai walidata, serta perangkat daerah sebagai produsen data membutuhkan mekanisme koordinasi yang terstruktur karena melibatkan hubungan kerja lintas organisasi dengan karakteristik tugas yang berbeda.

Meskipun memiliki arah hubungan positif, pengaruh komunikasi secara parsial belum menunjukkan signifikansi statistik. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas komunikasi belum mampu memberikan dampak optimal apabila tidak didukung oleh faktor lain, khususnya sumber daya dan struktur birokrasi. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi Program PSS tidak hanya bergantung pada kelancaran arus informasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kapasitas organisasi dalam mendukung pelaksanaan kebijakan secara menyeluruh. Dalam penelitian Masengi dan Tumbel, efektivitas komunikasi berbasis teknologi informasi dinilai mampu meningkatkan koordinasi dan kualitas pelayanan publik secara lebih efisien. Oleh karena itu, pemanfaatan platform digital oleh BPS Kota Tomohon menjadi penting untuk memperkuat distribusi pedoman, standar, dan instruksi statistik sektoral agar lebih mudah diakses oleh seluruh perangkat daerah. Nilai dimensi konsistensi yang relatif lebih rendah dibandingkan dimensi lainnya menunjukkan masih adanya potensi perbedaan pemahaman antarinstansi dalam menerima instruksi teknis terkait statistik sektoral. Situasi tersebut sejalan dengan perspektif Van Meter dan Van Horn yang menekankan bahwa efektivitas komunikasi antarorganisasi sangat dipengaruhi oleh konsistensi pesan sehingga tujuan dan indikator kebijakan dapat dipahami secara seragam oleh seluruh pelaksana. Dengan demikian, penguatan koordinasi melalui forum komunikasi yang lebih terstruktur serta

dokumentasi instruksi yang sistematis menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas implementasi Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Kota Tomohon.

2. Pengaruh Sumber Daya Terhadap Implementasi Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Kota Tomohon

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa variabel sumber daya berada pada kategori baik dengan nilai rata-rata sebesar 4,40 atau setara dengan 87,96 persen dari skor maksimum. Dimensi sumber daya manusia memperoleh nilai tertinggi sebesar 4,58, diikuti dimensi sikap pelaksana sebesar 4,52, sedangkan sarana dan prasarana menunjukkan nilai paling rendah sebesar 4,1. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kapasitas aparatur dan komitmen pelaksana pada umumnya telah mendukung implementasi Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Kota Tomohon, meskipun dukungan infrastruktur teknis masih memerlukan penguatan lebih lanjut. Analisis regresi memperlihatkan bahwa variabel sumber daya memiliki koefisien regresi positif sebesar 0,029, yang merupakan nilai paling kecil dibandingkan variabel independen lainnya. Temuan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan sumber daya cenderung diikuti peningkatan implementasi program, meskipun kontribusinya relatif terbatas ketika variabel lain diasumsikan konstan. Rendahnya nilai koefisien tidak secara langsung menunjukkan bahwa sumber daya tidak memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan. Hogwood dan Gunn justru menekankan bahwa keterbatasan sumber daya sering menjadi faktor yang menyebabkan kegagalan implementasi kebijakan. Dalam konteks Program PSS di Kota Tomohon, kondisi ini lebih menggambarkan bahwa tingkat sumber daya antarinstansi relatif homogen sehingga tidak menghasilkan variasi yang cukup besar dalam menjelaskan implementasi program secara parsial. Temuan tersebut juga memperkuat pandangan George C. Edwards III yang menempatkan sumber daya sebagai faktor yang memerlukan dukungan komunikasi dan struktur birokrasi agar implementasi kebijakan dapat berjalan secara optimal.

Meskipun pengaruh sumber daya secara parsial belum menunjukkan signifikansi statistik, hasil deskriptif memperlihatkan bahwa dimensi sarana dan prasarana masih menjadi aspek dengan capaian paling rendah dibandingkan dimensi lainnya. Kondisi ini memberikan implikasi bahwa penguatan infrastruktur teknologi informasi statistik serta peningkatan akses terhadap informasi teknis perlu menjadi perhatian dalam implementasi Program PSS di Kota Tomohon. Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dan sikap pelaksana yang positif belum sepenuhnya mampu menghasilkan implementasi yang efektif apabila belum didukung oleh kesiapan sarana dan prasarana yang memadai dari aspek teknis. Oleh karena itu, peningkatan dukungan fasilitas dan sistem informasi statistik menjadi langkah strategis yang perlu diprioritaskan oleh pemerintah daerah dan Badan Pusat Statistik Kota Tomohon.

3. Pengaruh Struktur Birokrasi Terhadap Implementasi Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Kota Tomohon

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa variabel struktur birokrasi berada pada kategori baik dengan nilai rata-rata sebesar 4,34 atau setara dengan 86,8 persen dari skor maksimum. Dimensi fragmentasi memperoleh nilai sedikit lebih tinggi sebesar 4,35 dibandingkan dimensi Standar Operasional Prosedur (SOP) sebesar 4,32. Meskipun kedua dimensi menunjukkan kategori yang positif, capaian pada dimensi SOP yang relatif lebih rendah mengindikasikan bahwa konsistensi penerapan prosedur kerja dalam penyelenggaraan statistik sektoral masih memerlukan penguatan yang lebih sistematis.

Analisis regresi memperlihatkan bahwa struktur birokrasi memiliki koefisien regresi positif sebesar 0,411, yang merupakan nilai tertinggi dibandingkan variabel independen lainnya. Temuan tersebut menunjukkan bahwa perbaikan struktur birokrasi cenderung memberikan kontribusi lebih besar terhadap peningkatan implementasi program dibandingkan

faktor lainnya. Kondisi ini relevan dengan karakteristik Program PSS yang melibatkan berbagai instansi pemerintah daerah sehingga membutuhkan mekanisme koordinasi yang jelas, pembagian tugas yang terstruktur, dan prosedur kerja yang terintegrasi. Dalam penelitian Tumbel, Siwij, Rantung, Polii, dan Mokodompit, koordinasi antarpemangku kepentingan disebut sebagai salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik di tingkat daerah. Oleh karena itu, penguatan koordinasi antara Badan Pusat Statistik Kota Tomohon sebagai pembina data, walidata, dan perangkat daerah sebagai produsen data menjadi aspek strategis dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan statistik sektoral.

Dominannya pengaruh struktur birokrasi dalam model penelitian ini juga sejalan dengan pandangan George C. Edwards III yang menekankan bahwa implementasi kebijakan akan berjalan lebih efektif apabila didukung oleh prosedur operasional yang jelas dan mekanisme koordinasi birokrasi yang fungsional. Sebaliknya, struktur birokrasi yang tidak terintegrasi berpotensi menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan. Pandangan tersebut diperkuat oleh Tumbel, Sendouw, dan Mokot yang menyatakan bahwa kejelasan prosedur dan pembagian kewenangan antarlembaga menjadi fondasi penting dalam membangun akuntabilitas kebijakan daerah. Dalam konteks Program PSS di Kota Tomohon, kejelasan hubungan kerja antara BPS, walidata, dan produsen data menjadi faktor penting untuk memastikan proses statistik sektoral berjalan secara efektif, terkoordinasi, dan akuntabel."

4. Pengaruh Simultan Komunikasi, Sumber Daya dan Struktur Birokrasi Terhadap Implementasi Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Kota Tomohon

Hasil pengujian menunjukkan bahwa komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi secara simultan berpengaruh terhadap implementasi Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Kota Tomohon. Kekuatan hubungan antarvariabel berada pada kategori sangat kuat dengan kemampuan model menjelaskan variasi implementasi program sebesar 66,6 persen. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas implementasi program tidak dapat dipahami hanya melalui pengaruh masing-masing variabel secara terpisah, tetapi lebih dipengaruhi oleh interaksi antarunsur organisasi yang bekerja secara bersamaan dalam proses implementasi kebijakan. Tidak signifikannya variabel secara parsial, namun munculnya pengaruh yang kuat pada pengujian simultan, mengindikasikan bahwa komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam mendukung pelaksanaan program. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kelemahan pada satu aspek tertentu berpotensi memengaruhi efektivitas aspek lainnya. Dengan demikian, implementasi Program PSS tidak hanya bergantung pada kualitas komunikasi, kapasitas sumber daya, atau kejelasan birokrasi secara individual, melainkan pada kemampuan seluruh komponen tersebut untuk bekerja secara terintegrasi dalam mendukung pelaksanaan kebijakan. Temuan penelitian ini sejalan dengan perspektif Van Meter dan Van Horn yang memandang implementasi kebijakan sebagai proses yang dipengaruhi oleh keterhubungan berbagai faktor organisasi dan lingkungan kebijakan. Dalam konteks penyelenggaraan statistik sektoral di Kota Tomohon, efektivitas implementasi program memerlukan koordinasi antarlembaga yang konsisten, dukungan kapasitas organisasi yang memadai, serta mekanisme birokrasi yang mampu memperjelas peran dan prosedur kerja antarunit pelaksana.

Dalam konteks penyelenggaraan statistik sektoral di Kota Tomohon, efektivitas komunikasi antarinstansi tidak akan menghasilkan implementasi yang optimal apabila tidak disertai kapasitas sumber daya yang memadai dan struktur birokrasi yang jelas. Sebaliknya, dukungan sumber daya yang baik juga tidak akan memberikan dampak signifikan apabila koordinasi dan pembagian kewenangan antarinstansi belum berjalan secara efektif. Demikian pula, struktur birokrasi yang tertata tidak akan mampu mendukung implementasi program apabila informasi mengenai prosedur dan standar statistik sektoral tidak disampaikan secara

konsisten kepada seluruh pelaksana. Temuan ini sekaligus memperkuat relevansi model George C. Edwards III dalam konteks implementasi statistik sektoral di tingkat pemerintah daerah. Oleh karena itu, upaya peningkatan Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Kota Tomohon perlu dilakukan melalui pendekatan yang bersifat integratif dengan memperkuat komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi secara bersamaan.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi memiliki hubungan positif terhadap implementasi Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Kota Tomohon. Meskipun pengaruhnya belum signifikan secara parsial berdasarkan hasil uji statistik, kualitas komunikasi tetap berperan dalam mendukung efektivitas implementasi program. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa komunikasi belum mampu memberikan kontribusi optimal apabila tidak didukung oleh faktor lain, terutama sumber daya dan struktur birokrasi yang memadai.

Variabel sumber daya juga menunjukkan hubungan positif dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,029. Akan tetapi, hasil uji parsial memperlihatkan bahwa nilai thitung yang diperoleh masih lebih kecil dibandingkan ttabel, sehingga variabel sumber daya belum memberikan pengaruh signifikan secara individual terhadap implementasi program. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan sumber daya saja belum cukup untuk mendorong keberhasilan implementasi apabila tidak diintegrasikan dengan faktor pendukung lainnya.

Variabel struktur birokrasi memiliki koefisien regresi positif terbesar, yaitu sebesar 0,411, yang menunjukkan bahwa struktur birokrasi merupakan variabel paling dominan dalam model penelitian. Namun demikian, hasil uji parsial masih menunjukkan bahwa pengaruhnya belum signifikan secara statistik karena nilai thitung sebesar 1,779 masih lebih rendah dibandingkan ttabel sebesar 2,052. Meskipun belum signifikan secara individual, struktur birokrasi tetap menjadi faktor yang memiliki kontribusi paling besar dibandingkan variabel independen lainnya dalam mendukung implementasi Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Kota Tomohon.

Komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi secara bersama-sama terbukti berkontribusi terhadap implementasi Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Kota Tomohon. Hubungan antarvariabel berada pada kategori sangat kuat dengan kemampuan model menjelaskan variasi implementasi program sebesar 66,6 persen. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas implementasi program tidak hanya bergantung pada satu faktor tertentu, tetapi dipengaruhi oleh keterpaduan antarunsur organisasi dalam mendukung pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, penguatan koordinasi komunikasi, peningkatan kapasitas sumber daya, dan penyempurnaan mekanisme birokrasi perlu dilakukan secara terintegrasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral di tingkat daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2022). *Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Kota Tomohon*. Jakarta: BPS.

- Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hogwood, B. W., & Gunn, L. A. (1984). *Policy analysis for the real world*. Oxford: Oxford University Press.
- Masengi, E. E., & Tumbel, G. (2021). Implementation of Communication Through Online-Based Applications with Schools (KABOS) at the Minahasa District Education Office. *Technium Social Sciences Journal*, 21(1), 27-37.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tumbel, G. H., Sendouw, R. H. E., & Mokat, J. (2019). Political Accountability through the Legitimacy of the Regional House of Representatives in Regional Regulations Making. *Proceedings of the International Conference on Social Science 2019 (ICSS 2019)*, 614-620. <https://doi.org/10.2991/icss-19.2019.117>
- Tumbel, G. H., Siwij, D. S. R., Rantung, M. I. R., Polii, E. H., & Mokodompit, F. (2023). Implementation of Child Identity Card (KIA) Policy in the Population and Civil Registration Service of Bolaang Mongondow Timur Regency. *Proceedings of the Unima International Conference on Social Sciences and Humanities (UNICSSH 2022)*, 1754-1760. https://doi.org/10.2991/978-2-494069-35-0_238
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445-488.